

ABSTRAK

YUDHA WIDYA SAPTA

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang sangat umum terjadi di masyarakat, yang dapat menjadi hal paling mengkhawatirkan bagi masyarakat. Indonesia telah mengatur, bagi pelanggar kejahatan tersebut dalam KUHP yang mengatur terkait dengan sanksi yang berlaku.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengambilan barang dari rumah setelah terjadi jual beli? Bagaimana pertanggung jawaban hukum tindak pidana pengambilan barang didalam rumah setelah terjadinya jual beli? Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengambilan barang didalam sebuah rumah setelah terjadinya jual beli menurut Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Pid/2022?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dari hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum tindak pidana pengambilan barang dari rumah setelah terjadi jual beli Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka harus ada pembuktian yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP Pertanggung jawaban hukum tindak pidana pengambilan barang didalam rumah setelah terjadinya jual beli, Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada pasal 362 KUHP Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengambilan barang didalam sebuah rumah setelah terjadinya jual beli menurut Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Pid/2022, bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dengan seksama secara tepat dan benar, lagi pula alasan tersebut tidak termasuk dalam materi pemeriksaan pada peninjauan kembali, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mengambil, Barang.

ABSTRACT

YUDHA WIDYA SAPTA

The crime of theft is a form of crime that is very common in society, which can be the most worrying thing for society. Indonesia has regulated violators of these crimes in the Criminal Code which regulates the applicable sanctions.

The problem is: What is the legal regulation of the criminal act of taking goods from a house after a sale and purchase has occurred? What is the legal responsibility for the crime of taking goods from the house after buying and selling? What is the judge's consideration in the criminal act of taking goods from a house after a sale and purchase has occurred according to Judicial Review Decision Number 52 PK/Pid/2022?

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

From the research results, the legal regulations for the criminal act of taking goods from the house after buying and selling have occurred. In order for a person to be declared proven to have committed a criminal act of theft, there must be evidence that fulfills all the elements of a criminal act of theft in the basic form as regulated in Article 362 of the Criminal Code. The criminal act of theft in the basic form as regulated in Article 362 of the Criminal Code. Legal responsibility for the criminal act of taking goods in the house after the sale and purchase has occurred. Theft in the main (ordinary) form as explained in Article 362 of the Criminal Code. Judge's consideration in the criminal act of taking goods in a house. after the sale and purchase occurred according to Judicial Review Decision Number 52 PK/Pid/2022, that the reasons for the judicial review of the Judicial Review Petitioner/Convict cannot be justified because both *Judex Facti* and *Judex Juris* have considered the juridically relevant legal facts revealed before the trial carefully and correctly, furthermore these reasons are not included in the examination material during the review, based on the considerations above, the reasons for review from the Judicial Review Applicant/Convict cannot be justified and must be rejected.

Keywords: Criminal Liability, Taking, Goods.